

# Penataan Lembaga Jadi Prioritas

JAKARTA, KOMPAS — Reformasi tata kelola organisasi menjadi salah satu prioritas kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam dua tahun ke depan. Terkait hal itu, Komnas HAM membentuk tim independen yang diketuai Erry Riyana Hardjapamekas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007.

"Guna memaksimalkan peran dan fungsi Komnas HAM, diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Teknologi informasi juga menjadi bagian penting," kata Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah di Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Menurut Hairansyah, kinerja Komnas HAM secara internal masih bermasalah. Koordinasi antarpemimpin belum optimal

sehingga kerja karyawan kurang terorganisasi dengan baik.

Pada 2015 dan 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan status *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) kepada Komnas HAM. Dari status itu, perbaikan prosedur standar operasi menjadi salah satu hal yang dituntut BPK terhadap Komnas HAM. "Sekarang, 95 persen tuntutan itu sudah diselesaikan," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM Tasdiyanto,

Menurut Erry, status *disclaimer* itu menunjukkan, prosedur kerja di Komnas HAM perlu diperketat. Kompetensi dan kerja karyawan juga perlu diperbaiki. "Kami akan melakukan pemetaan berdasarkan *input* dari seken, komisioner, dan karyawan.

**Prosedur kerja di Komnas HAM perlu diperketat.**

**Kompetensi dan kerja karyawan juga perlu diperbaiki.**

Erry Riyana Hardjapamekas

Visi dan misi Komnas HAM ke depan juga dibahas," katanya. Dalam penataan ini, Erry akan melibatkan para ahli di bidang sumber daya manusia, komunikasi, dan organisasi.

Anggota tim independen yang dipimpin Erry itu akan diumumkan akhir Februari 2018. Semen-

tara rekomendasi akan disampaikan ke Komnas HAM pada Juni 2018. Tindak lanjut rekomendasi direncanakan dimulai Juli 2018.

Di tengah upaya melakukan reformasi tata kelola organisasi, Komnas HAM mendapat akreditasi A dari Aliansi Global Institusi HAM Internasional. "Independensi, otonomi, dan profesionalitas kita diakui secara internasional dan sesuai Paris Principles. Namun, secara mikro, administrasi kami masih perlu perbaikan," ujar Tasdiyanto.

Paris Principles adalah prinsip yang disusun Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan independensi, otonomi, dan profesionalitas institusi HAM di dunia. (DD07)